



► MASALAH LINGKUNGAN

Pakar Usulkan Sampah Berbayar

Catur Dwi Janati & Triyo Handoko
redaksi@harianjogja.com

SLEMAN—Sampah harus dikelola secara simultan, dari hulu ke hilir, oleh pemerintah maupun masyarakat. Bila masalah sampah dibiarkan terus berlaut-laut, lingkungan bisa terancam.

Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Mohammad Pramono Hadi, mengusulkan konsep sampah berbayar. Menurutnya, konsep ini diawali dengan pengenalan jenis-jenis

sampah kepada masyarakat yang disusul dengan pembuatan peraturan yang mengatur konsep sampah berbayar.

Dalam konsep sampah berbayar, keluarga terlebih dahulu harus memilah sampah secara mandiri. Sampah dari bahan organik dapat dikelola sendiri dengan dijadikan kompos. Sementara, sampah plastik disisihkan. Sampah yang tidak dipilah akan dikenai biaya lebih mahal.

► Halaman 11

Pakar Usulkan...

"Pasti akan ada anggota masyarakat yang mampu membayar lebih banyak karena tidak sempat mengelola sampahnya sendiri. Apabila proses *reduce, reuse, recycle* [3R] pada sampah dilakukan dan diperketat, masyarakat akan berhemat," ujarnya, Kamis (27/7).

Metode sampah berbayar menjadi solusi masalah hulu pada tiap rumah tangga. Sementara, di tingkat hilir, harus ada teknologi pengolahan sampah di TPST Piyungan.

Pramono mengatakan gaya hidup manusia yang berubah turut mengubah karakteristik sampah yang dihasilkan.

Sekitar 40 tahun yang lalu, sampah didominasi organik, tetapi sejak 1980-an mulai banyak dijumpai kemasan sehingga sampah di perkotaan didominasi oleh bahan anorganik, terutama plastik.

Namun, perubahan karakteristik sampah ini tidak diiringi dengan

perubahan metode pengelolaan sampah di TPST Piyungan yang tetap menerapkan *sanitary landfill*.

Salah satu teknologi yang bisa diimplementasikan di TPST Piyungan ialah mengolah sampah menjadi bahan bakar. Pengurangan penggunaan bahan bakar batubara untuk PLTU dengan cara *co-firing* atau campuran bahan bakar tengah marak.

Sampah diproses dengan kadar air kurang dari 20% yang akan menghasilkan kandungan kalori untuk bahan bakar. Sampah dicacah, lalu dikompres dan diangin-anginkan, kemudian dikemas untuk menjadi bahan bakar. Teknologi ini menurut Pramono bisa diterapkan di TPST Piyungan.

Naikkan Retribusi

Sementara itu, Pemkot Jogja mengkaji kenaikan retribusi layanan sampah yang sekarang

Rp2.000 per keluarga per sebulan. Retribusi akan dinaikan karena Undang-undang Pengelolaan Sampah No.18/2008 mengamatkan empat tahun sekali ada evaluasi nilai retribusi. "Kenaikannya tidak akan sampai menyentuh Rp10.000 per bulan," kata Kepala Bidang Pengolahan Sampah DLH Jogja Ahmad Haryoko.

Haryoko memperkirakan retribusi sampah ke depan sebesar Rp4 ribu perbulan untuk tiap keluarga.

Pendapatan Pemkot Jogja dari retribusi sampah, jelas Haryoko, dalam setahun rata-rata Rp3 miliar. "Pendapatan dari retribusi sampah ini masih jauh dari biaya yang kami keluarkan untuk pengelolaannya," katanya.

Dalam satu tahun, Pemkot Jogja menghabiskan total biaya sekitar Rp16 miliar untuk mengelola sampah. Biaya pembuangan sampah ke TPA Piyungan sebesar Rp2,2 miliar.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005